



Sosialisasi Peran Pemerintah Desa Serta Partisipasi Masyarakat dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi di Desa Kuala Bubon

Noka Omalia, Chi Chi Belgiana, Erika Fadilah, Nurul Afifah, Nurkhairan

Univesitas Teuku Umar, Aceh Barat, Indonesia

ARTICLE INFORMATION

Received: May 17, 2024

Revised: May 30, 2023

Available online: June 30, 2024

KEYWORDS

Socialization, Village Government Role, Society Participation, Economic Growth.

CORRESPONDENCE

Name: Noka Omalia

E-mail: nokaomalia81@gmail.com

ABSTRACT

The Community Empowerment Program in the form of education is carried out in collaboration between students of the State Administration Study program and Kuala Bubon village government officials. With the theme "Community Empowerment: Socialization of the Role of Village Government and Community Participation in Increasing Economic Growth in Kuala Bubon Village" it has been successfully implemented. This socialization uses a method consisting of 3 stages, namely Pre-Socialization Activities, Socialization Activities, and Post-Socialization Activities. This socialization was attended by 25 students and 3 presenters who were Kuala Bubon Village Government Apparatuses. From the results of the socialization, it is known that Kuala Bubon Village has several village activities such as Salted Fish Processing, Kasab Embroidery, Mangrove Cultivation, and Nipah Ecotourism. In this case the village government acts as a regulator, dynamist, catalyst and facilitator. This role is supported by the participation of the Kuala Bubon village community because the opportunities, willingness and ability of the community in community empowerment have been fulfilled. Apart from that, there are also challenges faced by villages such as limited facilities, the ability of the community's technology, and seasonal changes.

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara terluas di Asia Tenggara dan menempati peringkat ke-15 di dunia dengan luas wilayah 5.193.250 km², untuk rincian luas daratan Indonesia memiliki luas 1.919.440 km², sedangkan luas laut ialah sekitar 3.273.810 km². Dikarenakan luas laut lebih besar daripada luas daratan, hal tersebut menjadikan Indonesia dijuluki sebagai Negara Maritim. Tidak hanya dari segi luas wilayah saja, negara yang dijuluki Zamrud Khatulistiwa ini juga memiliki sumber daya alam yang cukup melimpah, salah satunya pada sektor perikanan dan kelautan, potensi yang melimpah tersebut tersebar luas mulai dari Sabang sampai Merauke. Karena potensi laut yang cukup melimpah, hampir sebagian besar masyarakat yang tinggal dikawasan pesisir atau garis pantai Indonesia memanfaatkan kekayaan alam tersebut sebagai mata pencaharian dalam kehidupan sehari-hari seperti yang dirasakan oleh masyarakat desa Kuala Bubon. Kuala Bubon sendiri merupakan salah satu desa yang berada di kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh.

Desa yang memiliki luas wilayah mencapai 0,18 Km² ini berhadapan langsung dengan bibir pantai, karena letak geografis tersebutlah yang memengaruhi mata pencaharian masyarakatnya, hampir 95% penduduk desa berprofesi di sektor perikanan dan kelautan, seperti nelayan, pedagang ikan keliling, pengolah ikan asin, dan sebagainya. Hanya 0,5% saja yang bekerja selain sektor perikanan dan kelautan yaitu berprofesi sebagai petani dan pegawai negeri. Oleh sebab itu, masyarakat desa Kuala Bubon disebut juga sebagai masyarakat pesisir di Kabupaten Aceh Barat. Masyarakat Pesisir merupakan masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir atau sumber kehidupan perekonomian mereka bergantung pada pemanfaatan dari sumber daya laut atau pesisir melalui berbagai kegiatan penangkapan atau budidaya (Rahmanto & Purwaningsih, 2015).

Menjadi masyarakat pesisir, yang pada dasarnya bekerja tergantung pada hasil laut, bukan merupakan hal yang mudah bagi mereka. Banyak hambatan dan tantangan yang mereka hadapi selama bekerja. Sehingga masyarakat masih sering mengalami permasalahan terutama dalam ekonomi keluarga. Dalam hal ini dibutuhkan sebuah inovasi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat, yaitu melalui pemberdayaan masyarakat. Memberdayakan masyarakat ialah upaya yang dilakukan bertujuan untuk meningkatkan harkat serta martabat dari kalangan lapisan masyarakat bawah dengan segala macam keterbatasannya dan belum mampu melepaskan diri dari berbagai hal, seperti kondisi kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan (Hayat & Bunyamin, 2021). Dalam sebuah pemberdayaan dibutuhkan

perencanaan yang menyeluruh baik dari segi tahapan, target yang ingin dicapai, program yang ingin dilaksanakan, serta manfaat yang akan diterima nantinya.

Selain itu, terdapat pula unsur-unsur dalam sebuah pemberdayaan masyarakat. Menurut Darwanto (2007) dalam Mohamad Iqbal (2015) menjelaskan bahwasanya terdapat empat unsur dalam pemberdayaan masyarakat, yang terdiri atas: Pertama, Inklusi dan partisipasi masyarakat. Kedua, Akses pada informasi antara pemerintah dengan masyarakat atau masyarakat dengan masyarakat. Ketiga, Kapasitas organisasi lokal yang diartikan sebagai kemampuan masyarakat bekerja sama, dan mengorganisasikan perorangan atau kelompok, serta memobilisasi sumber daya yang ada dalam menyelesaikan sebuah masalah bersama. Keempat, Profesionalitas pelaku pemberdayaan baik aparat pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat (Bahua, 2015).

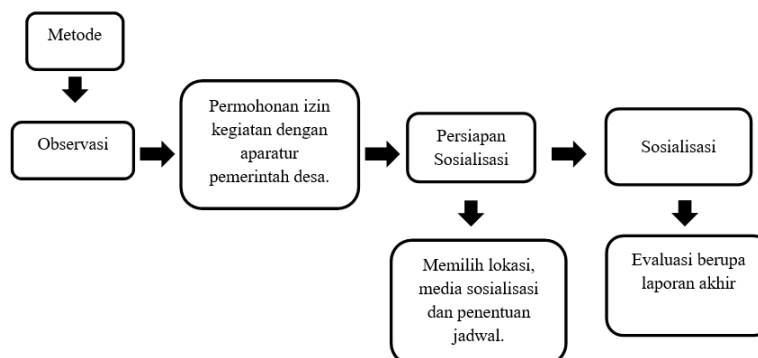
Dari unsur-unsur tersebut, terdapat pula dua peran penting dalam sebuah pemberdayaan masyarakat, yaitu pihak pemerintah desa dan pihak masyarakat desa. Maka dari itu, peran pemerintah sangat diperlukan dalam pelaksanaan sebuah pemberdayaan. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 127 Ayat (1) dikatakan bahwa pemerintah desa melakukan upaya pemberdayaan masyarakat desa, dan Pasal 128 Ayat (1) bahwasanya Pemerintah menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat desa dengan melalui pendampingan secara berjenjang sesuai kebutuhan.

Menurut Arif (dalam Nurdin 2014) dijelaskan bahwa peran pemerintah daerah terhadap pembinaan masyarakat dapat dibagi menjadi 4 peranan yaitu: Pertama, sebagai Regulator yang berarti pemerintah desa berperan sebagai pengarah atau memberikan acuan dasar kepada masyarakat sebagai instrument untuk mengatur sebuah kegiatan pelaksanaan pemberdayaan. Kedua, sebagai Dinamisator atau dapat diartikan sebagai penggerak partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan. Ketiga, sebagai Fasilitator yang artinya sebagai pemberi kenyamanan dan fasilitas dalam pemberdayaan. Keempat, sebagai Katalisator yaitu pemerintah berperan sebagai sosok agen kepada masyarakat untuk mempercepat berkembangnya potensi desa yang kemudian bisa menjadi modal sosial untuk meningkatkan partisipasi (Nurdin et al., 2014). Maka dari itu dalam Pemerintah desa memiliki kewajiban dalam merumuskan berbagai program yang sesuai agar pemberdayaan masyarakat dapat dilaksanakan secara berkelanjutan (Viki et al., 2022).

Selain peran pemerintah, ada pula unsur lain yang cukup penting dalam sebuah pemberdayaan masyarakat yaitu partisipasi masyarakat. Partisipasi dapat didefinisikan sebagai bentuk keikutsertaan seseorang atau sekelompok orang dalam sebuah kegiatan yang dilaksanakan. Partisipasi menurut Slamet (1985) terdapat tiga unsur pokok, yaitu: Pertama, adanya kesempatan yang diberikan untuk masyarakat dalam berpartisipasi. Kedua, adanya kemauan atau keinginan masyarakat untuk berpartisipasi. Ketiga, adanya kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi (Handini et al., 2019).

Partisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam rangka penentuan dan perencanaan sebuah kebijakan, atau dalam bentuk pengambilan keputusan (Kandati et al., 2019). Dari adanya peran pemerintah dan partisipasi masyarakat, maka kedua indikator tersebut tentunya diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Desa Kuala Bubon. Pertumbuhan Ekonomi diartikan sebagai suatu kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang atau jasa yang diproduksi oleh masyarakat menjadi semakin meningkat serta makmur (Rofii & Ardyan, 2017). Begitu pula yang diharapkan oleh desa Kuala Bubon dengan adanya pemberdayaan masyarakat di desa tersebut.

Metode



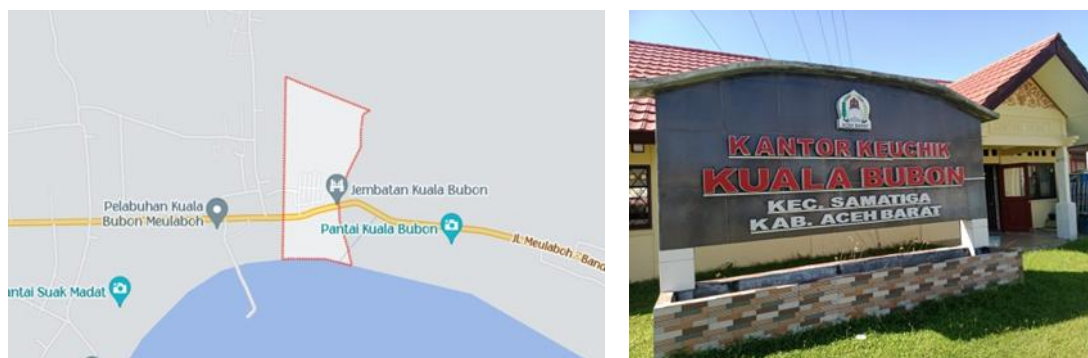
Gambar 1. Langkah pelaksanaan program sosialisasi.

Metode yang digunakan dalam proses pelaksanaan sosialisasi ini melalui tiga tahapan, yaitu pra-kegiatan sosialisasi, kegiatan sosialisasi, dan pasca kegiatan sosialisasi. Pada tahap pra-kegiatan sosialisasi, tim pelaksana melakukan observasi lapangan untuk mengetahui informasi pemberdayaan di desa dan berkomunikasi secara langsung dengan aparatur pemerintah desa Kuala Bubon terkait kesediaan dalam memfasilitasi pelaksanaan kegiatan sosialisasi yang akan dilaksanakan. Kemudian pada tahap kegiatan sosialisasi, pada tahap ini tim pelaksana memulai kegiatan sosialisasi dengan pemaparan materi oleh 3 aparatur desa selaku narasumber sosialisasi dan dibagi menjadi 3 pokok pembahasan diantaranya Pemberdayaan Masyarakat Desa, Peran Pemerintah desa dan Partisipasi Masyarakat Desa. Dan yang terakhir ialah pasca-kegiatan sosialisasi, untuk tahap ini seluruh audience mengumpulkan hasil resume selama sosialisasi berlangsung sebagai bahan pembelajaran dan evaluasi kedepannya terkait pemberdayaan masyarakat di desa Kuala Bubon.

Kegiatan sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman bagi mahasiswa terkait posisi penting pemerintah desa dan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kualitas ekonomi di Desa Kuala Bubon, selain itu sosialisasi juga diharapkan mampu memberikan inovasi dan kreatifitas bagi mahasiswa sebagai bahan penelitian dan penulisan karya tulis ilmiah kedepannya. Target dari sosialisasi ini ialah seluruh mahasiswa mendapatkan pengetahuan dan kesimpulan terkait ruang lingkup dan unsur partisipasi dari masyarakat di desa.

Hasil dan Pembahasan

Kegiatan sosialisasi ini berlangsung di desa Kuala Bubon, Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat dengan judul "Pemberdayaan Masyarakat: Peran Pemerintah Desa Serta Partisipasi Masyarakat Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi di Desa Kuala Bubon".



Gambar 2. Peta Desa Kuala Bubon sebagai lokasi pengabdian.

Kegiatan ini berlangsung pada hari Jum'at, 12 Mei 2023, tepatnya diselenggarakan pada pukul 14.00 sampai dengan 16.00 WIB. Dan diikuti oleh 25 orang yang merupakan Mahasiswa dari Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Teuku Umar. Dalam kegiatan ini, dihadirkan 3 pemateri yang merupakan Aparatur Pemerintah dari Desa Kuala Bubon yang terdiri atas Sekretaris Desa, Operator Desa dan Kepala Bidang Tata Usaha. Selain ketiga pemateri, acara sosialisasi juga dihadiri oleh Kepala Desa Kuala Bubon di lokasi pelaksanaan. Adapula rangkaian kegiatan dan pembahasan yang sudah berlangsung, terdapat pada Tabel 2.

Tabel 1. Rangkaian Pembahasan.

Pemateri	Jabatan	Isi Pembahasan
Bapak Taufik	Sekretaris Desa	Memaparkan terkait latar belakang desa mulai dari mata pencaharian, kondisi ekonomi masyarakat dan program desa.
Bapak Didik	Operator Desa	Memberikan gambaran tentang peran pemerintah desa dalam meningkatkan ekonomi masyarakat.
Bapak Gunawan	Bidang Tata Usaha	Menjelaskan terkait partipasi masyarakat serta hambatan dan tantangan dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat.

Dari pemaparan Bapak Taufik, selaku Sekretaris Desa Kuala Bubon, mengatakan bahwasanya 95% masyarakat desa bekerja pada sektor perikanan dan kelautan. bekerja sebagai nelayan sudah menjadi sebuah mata pencaharian yang turun temurun di desa tersebut, karena potensi laut yang cukup melimpah, tidak heran jika desa tersebut terkenal dengan hasil tangkap nelayannya. Mulai pada pukul 04.00 WIB masyarakat sudah mulai mempersiapkan diri untuk berlayar menggunakan perahu masing-masing untuk mencari ikan.

Mereka bekerja setiap hari kecuali pada hari Jum'at, dikarenakan mayoritas masyarakat desa sebagai nelayan merupakan seorang muslim, dan berjenis kelamin Laki-laki sehingga pada hari Jum'at seluruh para nelayan memilih untuk tidak beraktifitas ke laut. Maka dari itu, sebagian besar kegiatan masyarakat di Desa Kuala Bubon ialah pada sektor perikanan dan kelautan, seperti pada Gambar 3.



Gambar 3. Pembuatan Alat Tangkap dan persiapan nelayan sebelum berlayar

Setelah tangkapan berhasil dibawa pulang, para masyarakat nelayan langsung mengelola hasil laut tersebut dengan berbagai cara tergantung jenis ikan dan keinginan para konsumen, ada sebagian jenis ikan yang dijual langsung kepada pemborong, ada pula jenis ikan yang harus diolah terlebih dahulu menjadi ikan kering atau ikan asin. Desa Kuala Bubon sendiri sudah terkenal akan hasil tangkap yang cukup melimpah, hal tersebut menguntungkan pihak masyarakat desa, sebab akses perdagangan ikan tangkapan menjadi cukup luas, bahkan ada beberapa jenis ikan diekspor langsung keluar daerah, bahkan sampai ke negara tetangga seperti Thailand, Malaysia dan Singapura. Tak hanya dari segi perikanan saja, Desa Kuala Bubon juga terkenal akan wisata pantai yang cukup indah, serta budaya lokal yang cukup menarik, sebab desa Kuala Bubon juga terkenal akan hasil nipah, hutan mangrove dan kerajinan sulaman kasab, dengan demikian potensi yang dimiliki oleh desa Kuala Bubon cukup beragam dan tidak kalah dengan desa-desa yang lainnya.

Namun potensi yang dimiliki oleh desa Kuala Bubon belum mampu mencegah terhindarnya dari kemiskinan bagi masyarakat desa, bekerja sebagai seorang nelayan hanya bisa untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, sebab mereka bergantung pada hasil tangkapan yang tidak dapat diprediksi jumlahnya, ditambah lagi kondisi alam dan musim yang sering kali menghambat proses penangkapan ikan, ketika cuaca sedang tidak mendukung maka aktifitas nelayan akan terhenti pada hari itu, dan otomatis masyarakat nelayan tidak memperoleh penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dari kondisi tersebut mengakibatkan ekonomi masyarakat menjadi tidak stabil. Maka dari itu potensi yang dimiliki harus diiringi dengan sebuah strategi dan inovasi terkait peningkatan pertumbuhan Ekonomi. Maka dari itu salah satu bentuk upaya yang dapat dilaksanakan oleh desa ialah dengan melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat dapat berupa Pendampingan, Pelatihan, Pendidikan, Fasilitas, dan Modal Usaha. Untuk Desa Kuala Bubon sendiri, beberapa program telah terlaksana diantaranya seperti pada Tabel 2.

Tabel 2. Rangkaian Bentuk Pemberdayaan Masyarakat.

Kegiatan	Bentuk Pemberdayaan	Tujuan
Pengelolaan hasil tangkap nelayan.	Fasilitas dan Modal Usaha	Pemerintah desa memfasilitasi masyarakat seperti pembangunan TPI (Tempat Perdagangan Ikan), memberikan Bantuan Langsung Tunai, Modal Usaha,

			dan Boat kepada masyarakat yang membutuhkan.
Sulaman Kasab	Pendidikan dan Pelatihan		Meningkatkan ekonomi masyarakat melalui pelatihan sulaman kasab serta sebagai upaya melestarikan budaya lokal.
Ekowisata Nipah	Sarana dan Pendampingan		Membangun desa dengan ekowisata nipah sebagai upaya pembangunan kualitas ekonomi masyarakat.
Budidaya Manggrove	Pendidikan		Memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait pentingnya menjaga lingkungan laut dengan cara budidaya tanaman manggrove sebagai upaya mencegah abrasi kawasan pesisir.

Berdasarkan keempat kegiatan diatas, unsur-unsur dari pemberdayaan masyarakat di desa Kuala Bubon sudah tercapai, mulai dari Inklusi dan Partisipasi masyarakat desa, Profesionalitas Pemerintah desa dalam pelaksanaan kegiatan, Kapasitas organisasi dari pihak masyarakat yang sudah tersedia, serta tersedianya akses kepada masyarakat desa terkait suatu informasi. Akan tetapi dari keempat unsur tersebut, masih terdapat hambatan dan tantangan yang mengakibatkan proses pemberdayaan masyarakat desa belum maksimal.

Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi.

Ketidakstabilan ekonomi masyarakat menjadi suatu hal yang patut diperhatikan oleh pemerintah desa, maka dengan demikian peran pemerintah desa sangat dibutuhkan mulai dari menyelesaikan permasalahan masyarakat desa, penanggulangan kemiskinan, dan peningkatan kualitas ekonomi. Menurut Markus (2018) Peran dapat diartikan sebagai aspek dinamis kedudukan apabila individu melaksanakan suatu hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya , maka dia telah menjalankan suatu peranan tersebut dan setiap orang memiliki berbagai macam peranan tergantung apa yang diperbuatnya untuk masyarakat serta kesempatan seperti apa yang diberikan oleh masyarakat dalam menjalankan sebuah peranan tersebut (Markus et al., 2018). Dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat, pemerintah desa menjalankan perannya untuk mencapai tujuan tersebut, dalam hal ini pemerintah desa mempunyai 4 peranan dalam pembangunan ekonomi masyarakat melalui program pemberdayaan yaitu sebagai Regulator, Dinamisator, Fasilisator, dan Katalisator.

Terkait keempat peranan tersebut, Desa Kuala Bubon dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi telah berperan sebaik mungkin, dalam hal ini pemerintah desa telah menjadi Fasilisator bagi masyarakat dengan menyediakan sarana seperti ketersediaan transportasi yang mencapai 20 Boat, Tempat sandaran Kapal, Tempat Perdagangan Ikan (TPI), serta akses perdagangan hasil tangkap, namun pemerintah desa belum mampu menyediakan alat pendingin ikan bagi masyarakat dikarenakan biaya operasi dan teknologi masih cukup terbatas. Selain itu, pemerintah desa juga sudah berperan sebagai Dinamisator atau penggerak dalam menyelesaikan sebuah permasalahan di lingkungan masyarakat, yang telah dilakukan oleh pemerintah desa Kuala Bubon diantaranya ialah membentuk program pendidikan bagi masyarakat terkait edukasi penggunaan alat tangkap ikan, budidaya nipah dan ekowisata nipah.



Gambar 4. Tempat Bersandar perahu masyarakat nelayan.

Pemerintah desa Kuala Bubon juga berperan sebagai regulator bagi masyarakat sebab setiap pelaksanaan program pemerintah desa terus membangun komunikasi dengan masyarakat melalui musyawarah, salah satunya ialah pelaksanaan Musrembang Desa dan ikut serta dalam upaya mitigasi bencana melalui budidaya hutan Mangrove. Selain itu, pemerintah desa juga selalu memberikan arahan dan kebijakan terhadap sebuah perencanaan. Dan yang terakhir, sebagai Katalisator, Pemerintah Desa Kuala Bubon berperan untuk mempercepat pelaksanaan program dengan menentukan target dan meningkatkan partisipasi masyarakat desa.

Partisipasi Masyarakat Desa Kuala Bubon

Dalam proses pemberdayaan tentunya dibutuhkan partisipasi masyarakat desa, sebab pemberdayaan akan berfokus pada masyarakat sebagai target pencapaian tujuan. Dalam partisipasi masyarakat terdapat 3 unsur pokok yaitu terdapat kesempatan yang diberikan kepada masyarakat dalam berpartisipasi, kemudian adanya kemauan dari masyarakat untuk berpartisipasi, serta adapula kemampuan masyarakat tersebut untuk berpartisipasi.

Dalam hal ini, untuk ketiga unsur tersebut sudah tercapai, dikarenakan masyarakat desa telah memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi mulai dari ikut serta Musrenbang Desa, adanya komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat, dan adanya kesempatan untuk mengembangkan kemampuan yang mereka miliki melalui berbagai program yang dibentuk oleh pemerintah desa tersebut, seperti mengikuti pelatihan sulaman kasab dan pendidikan terkait pemanfaat budidaya Mangrove sebagai bentuk mitigasi bencana. Kemudian masyarakat desa juga memiliki kemauan untuk berpartisipasi, dalam hal ini masyarakat sudah mulai sadar dan peka terhadap berbagai program pemberdayaan masyarakat di Desa Kuala Bubon.



Gambar 5. Dokumentasi pada saat Sosialisasi

Terakhir, Masyarakat juga memiliki kemampuan dalam berpartisipasi. Sebuah kegiatan dibuat tentunya disesuaikan dengan potensi desa, seperti sumber daya alam (Ikan, Wisata Nipah dan Budidaya Mangrove), serta potensi Sumber daya manusianya (Mampu menyulam kasab dan mengelola wisata pantai). Maka dari itu, partisipasi masyarakat desa Kuala Bubon sudah memenuhi ketiga unsur tersebut, hanya saja dibutuhkan upaya untuk mengoptimalkan partisipasi masyarakat, terutama terkait tantangan yang mereka hadapi mulai dari kemiskinan, fasilitas yang terbatas, tata cara yang masih tradisional dan pendidikan serta pelatihan teknologi yang rendah, sehingga peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat desa belum sepenuhnya berhasil dicapai meskipun pemberdayaan tersebut sudah ada

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Dari ketiga pemateri yang hadir, seluruh indikator pembahasan berhasil tercapai sepenuhnya, pelaksanaan sosialisasi juga berjalan dengan lancar dan tertib. Dan seluruh mahasiswa mendapatkan jawaban dari pembahasan tersebut, terkait pembahasan yang dapat disimpulkan bahwasanya Desa Kuala Bubon memiliki beberapa jenis kegiatan diantaranya ialah pengelolaan hasil tangkap, ekowisata nipah, pengelolaan hutan mangrove, pengolahan ikan asin dan sulaman kasab. Lalu, Pemerintah Desa Kuala

Bubon memiliki peranan terhadap pemberdayaan masyarakat dalam empat bentuk peran yaitu sebagai regulator, fasilitator, dinamisator, dan katalisator. Selain itu, terdapat pula partisipasi masyarakat desa Kuala Bubon, yang mana ketiga unsur partisipasi berhasil tercapai oleh desa, mulai dari kemauan, kemampuan dan kesempatan dalam berpartisipasi. Akan tetapi dalam upaya pertumbuhan ekonomi masyarakat masih dibutuhkan strategi yang lebih lanjut, sebab masih banyak tantangan yang diterima, mulai dari pendidikan dan pelatihan yang masih rendah, fasilitas yang terbatas, serta pengelolaan ikan yang masih tradisional.

Saran

Dengan adanya sosialisasi ini dapat menjadi suatu nilai yang berharga bagi seluruh mahasiswa terkait peran pemerintah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat serta menambah informasi terkait pemberdayaan yang terlaksana di Desa Kuala Bubon saat ini. Sosialisasi ini juga diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi pemerintah terkait hambatan dan tantangan yang dialami oleh masyarakat desa saat ini. Selain itu, dengan adanya sosialisasi ini dapat menjadi bahan penelitian bagi mahasiswa untuk lebih berinovasi terhadap potensi yang dimiliki oleh Desa Kuala Bubon

Daftar Pustaka

- Bahua, M. I. (2015). *PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI INDONESIA*.
- Handini, S., Sukei, & Astuti, H. K. (2019). *Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Pengembangan UMKM di Wilayah Pesisir Pantai*.
- Hayat, S., & Bunyamin, S. (2021). *Pemberdayaan Masyarakat dengan Menerapkan Metode Pra (Participatory Rural Appraisal) melalui Aspek Teknologi , Sosial dan Keagamaan Community Empowerment by Applying the Pra (Participatory Rural Appraisal) Method through Technological , Social and Religious Aspects. Desember*.
- Kandati, F., Mantiri, M., & Monintja, D. (2019). *EMBERDAYAAN MASYARAKAT NELAYAN DI KECAMATAN SIAU BARAT SELATAN KAMPUNG BATUSENGGO (Suatu Studi Pada Dinas Peikanan, Kabupaten Kepulauan Siau Barat Tagulandang). EKSUTIF : Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan, 2(2), 1-8*.
- Markus, A., Nayoan, H., & Sampe, S. (2018). *PERANAN LEMBAGA ADAT DALAM MENJAGA KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT DI DESA SALURANG KECAMATAN TABUKAN SELATAN TENGAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE. 1*.
- Nurdin, M., Nurmaeta, S., & Tahir, M. (2014). *Peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat petani jagung di kecamatan biringbulu kabupaten gowa. IV(1), 66-78*.
- Rahmanto, D., & Purwaningsih, E. (2015). *Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Pulau Untungjawa Dalam Upaya Meningkatkan Kesadaran Hukum Dan Kemandirian Nelayan. Jurnal Hukum, 7(1), 112-125*.
- Rofii, A. M., & Ardyan, P. S. (2017). *Analisis pengaruh inflasi, penanaman modal asing (pma) dan tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi di jawa timur. 2*.
- Viki, M., Al, N., Studi, P., Pemerintahan, I., Timur, T., Karawang, K., Barat, J., Viki, M., Al, N., Karawang, U. S., Petani, M., & Kertamukti, D. (2022). *PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PEMBERDAYAAN. VII(01)*.